

# **Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang**

Oleh :

SM. Angga Manggala P, Fathurrahman, R. Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAKSI**

Upaya peningkatan perekonomian di daerah harus dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai – nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal. Inilah hal ingigin pemerintah kelola sesuai isi dan tujuan regulasi perda No. 06 Tahun 2008 mengenai kepemilikan SIUP. SIUP sebagai instrumen legalitas diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban usaha perdagangan sehingga pengawasan dan pengendalian dapat berjalan secara optimal.

Studi ini mengukur dampak pemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di kota Semarang. Dengan menggunakan desain penelitian *Singgle program after – only*, kami berusaha untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa kepemilikan SIUP berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha khususnya terhadap produsen batik di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil pembahsan penelitian Evaluasi Dampak Pemilikan SIUP terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik di Kota Semarang seperti yang kami paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan SIUP mampu meningkatkan pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang. Pertumbuhan usaha yang dimaksud ialah peningkatan produktivitas sumberdaya dan peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan.

Kata kunci : Evaluasi Dampak, Perda No.06 Tahun 2009 mengenai kepemilikan SIUP, Pertumbuhan Usaha Produsen batik di Kota Semarang.

## ABSTRACT

Economic development for business growth based on local potential must supported by legality. SIUP as a legal instrument are expected to provide certainty and trade orderliness so efforts to controlled trading activity can be optimized.

This studies measures the impact of SIUP to business growth the batik producers in Semarang City. Using descriptive qualitative method single program after – only, tried to explain that SIUP have positive impact for business growth especially in batik producers in Semarang City. Business growth increase resource productivity and increase the efficiency of trade.

Keywords: Impact Evaluation, Ownership of SIUP, Business Growth, Batik Producers in Semarang City.

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha memerlukan perlindungan, pengendalian, Pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan, ditambah lagi semakin meningkatnya tuntutan terkait perlindungan konsumen mewajibkan Negara ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pemberian izin terkait usaha perdagangan di Kota Semarang diatur melalui Perda No 06 tahun 2009 mengenai kepemilikan SIUP. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan perdagangan merupakan kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Berikut ini merupakan uraian terkait Perda No. 06 tahun 2009 mengenai kepemilikan SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai instrumen legalitas juga digunakan untuk bahan pendataan terkait pelaku dan profil usaha perdagangan di Kota Semarang. Sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ini menghasilkan Sistem Informasi perdagangan. Informasi yang terdapat dalam SIP (Sistem Informasi Perdagangan) berupa gambaran terkait fenomena aktivitas perdagangan meliputi para pelaku perdagangan di Kota Semarang beserta profil unit usahanya.

SIP (Sistem Informasi Perdagangan) dibutuhkan untuk pembinaan, pengembangan usaha, dan kelembagaan perdagangan guna meningkatkan iklim usaha di bidang perdagangan. Manfaatnya ialah sebagai; media penyebaran informasi dan promosi terkait usaha perdagangan, efisiensi dan pengembangan usaha perdagangan, mempermudah mencari mitra dan relasi bisnis, terakhir SIP dapat dijadikan dasar

dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi pemerintah(biasanya berbentuk program atau kebijakan teknis birokratis).

Fasilitas yang diberikan pemerintah terkait pengembangan usaha bagi pemilik SIUP antara lain:

1. Kesempatan mengikuti lelang kegiatan pengadaan barang (tender).
2. SIUP merupakan syarat melakukan kegiatan ekspor.
3. Syarat untuk mendapatkan izin – izin lain yang biasanya lebih spesifik.

Maslah – masalah yang biasanya muncul terkait perizinan ialah masalah eksternalitas, masalah barang publik, asimetri informasi dan pelanggaran HaKI. Sedangkan masalah – masalah yang tampak terkait unit usaha batik antara lain; pencemaran lingkungan (limbah), kegiatan usaha yang belum terintegrasi, dan masalah – masalah lain terkait kelembagaan yang belum efektif dan efisien.

Selain paparan di atas kepemilikan SIUP memiliki banyak manfaat antara lain SIUP (legalitas) menunjukan citra positif pelaku usaha dihadapan rekan bisnis dan konsumen. Dengan kepemilikan SIUP unit usaha menjadi lebih bonafit.

Berikut ini gambaran terkait aksi dan konsekwensi regulasi terkait kepemilikan SIUP:

1. Input : SIP (Sistem Informasi Perdagangan) berupa informasi terkait pelaku usaha dan unit usaha perdagangan di Kota Semarang.
2. Proses: Pendataan, Penmbinaan, dan Pengawasan oleh Birokrasi Pemerintah.
3. Output : Mempermudah, mengikuti tender, mampu melakukan ekspor, memperoleh kepastian dan perlindungan usaha.
4. Dampak : Meningkatkan Pertumbuhan Usaha.

Tetapi fakta dilapangan tidaklah demikian, UMKM 95% dari keseluruhan jenis usaha di Indonesia kebanyakan masih berada pada sektor informal dan tidak terdaftar atau tanpa status hukum. Begitu juga dengan unit usaha batik yang baru – baru ini santer dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang para pelakunya belum mengerti seluk – beluk pengurusan dan manfaat kepemilikan SIUP. Misalnya, Komunitas Batik Kluster Semarang yang mayoritas anggotanya belum memiliki SIUP meskipun usahanya sudah berjalan beberapa tahun.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Dampak Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang”**.

## **B. TUJUAN**

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil Tujuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak kepemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang.

## **C. TEORI**

1. Evaluasi Kebijakan.

Lester dan Stewart (2000) menyatakan evaluasi kebijakan hakekatnya mempelajari konsekwensi – konsekwensi kebijakan publik. (Solahudin Kusumanegara,2010).

Kebijakan publik selalu mendukung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program program aksi dan proyek.<sup>1</sup>

Setelah evaluator membuat suatu daftar tujuan beserta dimensi waktunya, evaluator perlu menetapkan indikator untuk mengukur efektivitas setiap tujuan.

Indicator yang sah mampu mengukur hasil berbanding dengan tujuan (konsep / program) yang dicapai oleh suatu kebijakan. Sedangkan kehandalan (reliable) indikator mampu menghasilkan skor yang sama untuk fenomena yang sama.

Evaluasi kebijakan bersifat deskriptif dan analitis. Dalam hal ini evaluator mengamati apa yang berlangsung sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan. Agak sulit untuk memastikan apakah pencapaian tujuan benar – benar diakibatkan oleh suatu kebijakan karena sifatnya yang sangat kompleks dan berbagai factor pengganggu bisa masuk dan mengacaukan evaluasi kebijakan.

Berikut ini jenis desain evaluasi menurut Fenterbusch dan Motz:

1. Singgle program after – only, untuk memperoleh informasi terkait keadaan kelompok sasaran.

2. Singgle program before – after, untuk memperoleh informasi terkait perubahan keadaan kelompok sasaran.
3. Comparative after – only, untuk memperoleh informasi keadaan sasaran dan bukan sasaran.
4. Comparative before – after, untuk memperoleh informasi terkait efek program terhadap kelompok sasaran.

Indikator evaluasi dampak kepemilikan SIUP terhadap Pertumbuhan usaha produsen Batik di Kota Semarang (Indikator program menurut Langbein, 1980:15):

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi.

- a. Peningkatan produktivitas sumberdaya.
- b. Peningkatan efisiensi Ekonomi.
  - Mempebesar peluang.
  - Penyediaan informasi.
  - Pengurangan resiko.
  - Memperluas akses masuk pasar.

#### 2. Keadilan Distribusi.

- a. Kecukupan.
- b. Keadilan Horisontal.
- c. Keadilan Vertika.

#### 3. Preferensi warga Negara.

- a. Kepuasan.
- b. Kepentingan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Samodra Wibawa,(1994).Evaluasi Kebijakan Publik.Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.

## **D. METODE**

Penulisan ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran terkait objek penelitian. Sehingga dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti mencoba menjelaskan dan mengevaluasi dampak kepemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang.

### **a. Situs dan Informan**

Penelitian ini mengambil lokus di Kota Semarang dengan produsen batik sebagai informan utama penelitian.

### **b. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini informan yang akan menjadi nara sumber penelitian adalah produsen batik di Kota Semarang dengan kepemilikan SIUP.

### **c. Jenis Data**

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan jenis data yang berupa :

1. Data angka (ordinal).
2. Data tertulis
3. Data gambar
4. Data table

### **d. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Data primer**

Responden yaitu produsen batik di Kota Semarang dengan kepemilikan SIUP.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan pertumbuhan usaha unit usaha batik di Kota Semarang.

### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Observasi dan kuesioner tertutup.

### **f. Analisis dan Intrepretasi Data**

Kusioner tertutup menggunakan coding dibantu tabel dan analisis statistik non- parametric untuk menjelaskan adanya pertumbuhan usaha produsen batik dengan cara menguji sampel sesudah mengalami perlakuan.

### **g. Kualitas Data**

Teknik untuk menguji kualitas data yang digunakan adalah, antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

## **E. PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Fenomena Dampak Kepemilikan SIUP terhadap Pertumbuhan Usaha**

Pertumbuhan usaha nilainya sangat dipengaruhi oleh proses produksi, distribusi dan konsumsi. Indikatornya ialah sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan produktivitas Sumber daya.**

Kepemilikan SIUP diharapkan mampu mempermudah produsen Batik untuk memperoleh bantuan modal (bantuan cuma – cuma biasanya berupa alat produksi dll). Namun realita dilapangan belumlah demikian diakrena produksi batik masih sangat meminimalkan penggunaan teknologi atau mesin selain itu pengembangan batik masih belum menjadi prioritas sehingga anggaran yang dikurcurkan pemerintah disektor ini masih sangat terbatas.

Kemudahan memperoleh batuan kredit sangat dirasakan manfaatnya oleh produsen batik. Kepemilikan SIUP merupakan point yang selalu ditanyakan terkait bantuan kredit meskipun begitu jaminan masih merupakan poin utama meskipun pinjaman dalam jumlah tertentu tidak mengharuskan adanya jaminan sebagai syarat mendapatkan bantuan kredit.

Keinginan menambah tenaga kerja meningkat setelah produsen batik memiliki SIUP. Hal ini dikarenakan permintaan yang meningkat mengharuskan produsen batik untuk

meningkatkan hasil produksi pula dan salah satu solusinya ialah meningkatkan tenaga kerja.

Keinginan meningkatkan hasil produksi ini merupakan dampak taklangsung dengan adanya kepemilikan SIUP. Dengan semakin mudahnya mengakses pasar dan memanfaatkan fasilitas pengembangan yang disediakan maka keinginan untuk meningkatkan hasil produksi akan muncul dan hasil penjualan dan labapun akan turut meningkat.

##### **b. Peningkatan Efisiensi Ekonomi**

Peningkatan efisiensi ekonomi memiliki beberapa indikator sebagai berikut; keinginan dan kemudahan meningkatkan akses masuk pasar dan meminimalkan resiko usaha.

Akses masuk pasar akan semakin efisien jika produsen batik mampu melakukan penetrasi baik dipasar lokal maupun internasional. Internasionalisasi perdagangan biasanya dilakukan melalui kegiatan ekspor, sedangkan pasar lokal dapat di dorong pendapatanya dengan cara memperbanyak kerjasama perdagangan dan memperluas kases pasar dalam negeri. Namun sayang sekali kepemilikan SIUP hanya sedikit berdampak terhadap peningkatan efiseinsi kegiatan ekonomi produsen batik di aKota Semarang.

Sedangkan SIUP sebagai intrumen legalitas sudah sangat efektif mempermudah pelaku usaha perdagangan khususnya bati di Kota Semaranglebih mudah diterima oleh masyarakat.

## B. ANALISIS

### 1. Penilaian Pertumbuhan Usaha Produsen Batik (after –only)

Dengan metode skoring dimana angka 0 menunjukkan tidak ada dampak sedangkan angka 3 merupakan nilai optimal setiap variabel yang telah diukur dan kami akumulasikan dan hasilnya ialah sebagai berikut:

1. Berdasar tabel 4.1 halaman 76 menunjukkan kepemilikan SIUP mempermudah pertumbuhan ekonomi produsen batik rata – rata 25,6 atau jika diprosentasikan sebesar 65,6%.

2. Indikator produktivitas sumber daya dirasa dipermudah peningkatannya sebesar 76%.

3. Sedangkan efisiensi kegiatan ekonomi dirasa masih belum optimal. Kepemilikan SIUP dirasa masih sedikit mempermudah peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan. Pertumbuhan yang dirasakan jika diprosentasekan sebesar 57% lebih rendah dibandingkan indikator peningkatan produktivitas sumber daya unit usaha batik di Kota Semarang.

### C. Profil Pertumbuhan usaha pada perusahaan “Batik Semarang 16”

Ny. Umi Sumiyati Adi merupakan pemilik unit usaha Batik Semarang 16 yang terletak di Desa Sumberejo, Kelurahan Meteseh, Kec. Temabalong Semarang.

Mulai berproduksi ditahun 2005 dan baru memiliki SIUP (legalitas) di tahun 2007. dari hasil penelitian kami menunjukkan terdapat perbedaan sebesar 6,77 atau 60% antara sebelum dan sesudah kepemilikan SIUP. Peningkatan pertumbuhan usaha ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah produksi dan penjualan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi dampak pemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang terbukti mampu mendorong atau mempermudah peningkatan pertumbuhan usaha produsen batik Semarang. Menurut hasil evaluasi kebijakan menggunakan model evaluasi kebijakan *after-only* menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan usaha yang rata – rata sebesar 65,6% berdasar pada tabel 4.1 (hal., 76) berupa kemudahan memperoleh pinjaman dan kemampuan produksi yang lebih baik dengan kepemilikan SIUP. Sedangkan analisis *before – after* misalnya pada kasus “Unit Usaha Batik Semarang 16” menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan usaha sebesar 6,77 (berdasar tabel 4.2 hal 78) antara sebelum dan sesudah kepemilikan SIUP atau tumbuh 60% antara sebelum dan sesudah kepemilikan SIUP pertumbuhan ini berupa hasil produksi dan penjualan.

Meskipun kepemilikan SIUP pada produsen batik belum maksimal namun kepemilikan SIUP terbilang

sudah cukup mampu merangsang produsen batik agar mau meningkatkan pertumbuhan usahanya. Para produsen pemilik SIUP mayoritas memiliki produktivitas sumber daya yang tinggi, efisiensi perdaganganpun mengalami peningkatan, yang pasti SIUP sebagai instrument legalitas mampu memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam melaksanakan usaha produksi dan perdagangan Batik di Kota Semarang.

Pemilikan SIUP memang mampu mendorong atau mempermudah produsen batik untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Namun data dilapangan menunjukan terkait indikator peningkatan produktivitas Sumberdaya jika dibandingkan dengan indikator peningkatan efisiensi ekonomi usaha batik menunjukan belum adanya pemerataan. Kepemilikan SIUP Lebih berdampak terhadap peningkatan produktivitas dibanding efisiensi perdagangan sebesar 49:38.

Ada 3 sub-indikator yang menunjukan ketidak optimalan dampak SIUP terkait variabel pertumbuhan Usaha antara lain; Kemudahan mendapat fasilitas bantuan modal sebesar 36,7 %, mendorong kemampuan ekspor sebesar 26,7%, dan terakhir mendorong produsen batik untuk mendaftarkan HAKI terkait paten motif batik.

## **B. REKOMENDASI**

SIUP sudah cukup membantu para produsen untuk meningkatkan produktivitas sumber daya usahanya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik, namun optimalisasi kepemilikan SIUP harus dikedepankan, disatu sisi dampak SIUP untuk merangsang efisiensi ekonomi usaha batik nampaknya perlu di tingkatkan. Akses pasar sebagai salah satu elemen efisiensi dirasa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari segi jangkauan pasar yang masih sempit

(Kota Semarang) dan sekitarnya akibat masih sedikitnya jumlah relasi. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memotivasi para pelaku usaha agar lebih berani memperluas pasar tentunya dibantu dengan program – program yang merangsang perluasan tersebut.

Terdapat 3 indikator yang menunjukan masih lemahnya dampak SIUP terhadap pertumbuhan produsen batik di Kota Semarang. Pertama, kepemilikan SIUP belum berdampak optimal terhadap kemudahan memperoleh bantuan modal. kami berpendapat bahwa selain memiliki dampak ekonomi unit usaha batik juga memiliki banyak manfaat lain sebagian besar tenaga kerja unit usaha batik ialah perempuan maka sudah barang tentu hal ini perlu didukung oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemberdayaan perempuan khususnya diwilayah Kota Semarang terlebih – lebih batik memiliki unsure budaya yang perlu dilestarikan sehingga wajar optimalisasi sumber daya pemerintah pada sector ini merupakan suatu keharusan.

Kedua, kepemilikan SIUP belum mampu mempermudah produsen batik Semarang untuk melaksanakan kegiatan ekspor. Keterbatasan kemampuan produsen batik untuk melakukan ekspor sebenarnya memang belum menjadi prioritas saat ini dimana unit usaha batik di Semarang memang masih pada tahap berkembang. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang internasionalisasi perdagangan batik Semarang perlu dicermati. Keunggulan produk batik Semarang selama ini hanya mampu merajai di Kota Semarang sedangkan diluaritu didominasi oleh produk batik dari kota lain. Spesifikasi pasar internasional bisa menjadi alternatif pilihan karena naturalisme produk Batik Semarang memungkinkan



produk ini bisa masuk menjadi bahan baku industri pakaian eksklusif di luar negeri karena keunikanya seperti beberapa pameran yang diadakan Pemerintah Kota Semarang yang melibatkan desainer – desainer papan atas nasional mendapat respon positif di mata internasional.

Ketiga, kepemilikan SIUP belum mempermudah produsen batik untuk memperluas jangkauan pasar penjualan mereka. Hal ini menunjukkan sistem informasi perdagangan belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Sistem informasi yang akurat dan aktual seharusnya mampu mempermudah produsen batik mengetahui informasi terkait peluang – peluang ekonomi misalnya kegiatan pengadaan barang baik dalam kota maupun luar kota. Hal ini juga menunjukkan pendataan, pembinaan, pengawasan pemerintah terkait unit usaha batik di Kota Semarang masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( II )*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nawawi, Ismail.2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Nugroho,D.Ryant.2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Sukirno. Sadono. 1994.Makro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Konsep*. Yogyakarta :Media Pressindo.

Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 06 Tahun 2009 tentang SIUP